

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS OPTIMASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2003-2009**

**Oleh :**

**Jimmy Fernando Alfred**

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, strategi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan pemerintahan adalah dengan memperbesar porsi kemampuan pengelolaan keuangan. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yaitu tanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna (efektifitas), serta pengendalian.

Pelaksanaan otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk bisa mengelola potensi sumber daya alam memperkuat penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kewenangan itu terkait erat dengan masih terbatasnya sumber penerimaan daerah yang berasal dari pusat. Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari a) Pendapatan Asli Daerah, b) Dana Perimbangan, c) Pinjaman Daerah, d) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Sendiri terdiri dari pajak dan Retribusi Daerah, Laba hasil perusahaan daerah, dan lain-lain dan retribusi daerah pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-undang no. 34 tahun 2000.

Permasalahan yang muncul kaitannya dengan optimasi penerimaan pajak reklame terhadap PAD ketidakseimbangan pertumbuhan pemasangan reklame yang besar terhadap penerimaan sektor pajak reklame di Bandar Lampung tahun anggaran 2003-2009. Hal ini di cerminkan dari adanya penyimpangan antara realisasi dan potensi pajak reklame tersebut yang disebabkan oleh perencanaan penetapan target penerimaan Pajak Reklame yang kurang tepat sehingga dalam pencapaian target secara umum selalu tercapai, padahal target tersebut masih bisa ditingkatkan lagi guna mencapai kata optimasi di sektor penerimaan pajak reklame ini agar dapat menyokong ke pemasukan PAD yang lebih besar lagi.

Pembinaan terhadap wajib pajak dan petugas pemungutan pajak dengan cara melakukan pendekatan dengan para pengusaha biro jasa reklame untuk

Jimmy Fernando Alfred

memperkecil munculnya reklame liar, mensosialisasikan Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2008 melalui media mengefektifkan kinerja para petugas pemungut pajak reklame dengan melakukan pelatihan secara berkala.

Dari hasil penelitian di peroleh bahwa optimasi penerimaan pajak reklame ditinjau dari Potensi pajak reklame dalam kaitannya dengan pertumbuhan usaha biro jasa Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2003-2009 adalah rata-rata sebesar Rp 2.673.288.774. Hasil perhitungan potensi penerimaan pajak reklame dalam kaitannya dengan usaha biro jasa reklame Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa terdapat selisih antara potensi dengan realisasi sebesar Rp 380.704.176 atau 85,75 % pajak reklame yang tergalai dan 14,25 % pajak reklame yang hilang. Pajak reklame yang hilang inilah yang mencerminkan bahwa penerimaan dari sector pajak reklame ini masih belum optimal. Dan perlu di tingkatkan lagi.